BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang kaya akan sumber daya alam, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Indonesia termasuk ke dalam kategori negara berkembang, yang bisa dikatakan sedang menuju menjadi negara maju, dengan melakukan berbagai reformasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada setiap daerah, guna mewujudkan pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomimerupakan suatu perubahan tingkat pendapatan perkapita dari tahun ke tahun yangtidak disertai dengan perubahan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator dalam melihat terjadinya pertumbuhan ekonomi diantaranya adanya peningkatan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional serta jumlah pengangguran lebih kecil dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Disamping itu, terjadinya penurunan angka kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Sedangkan indikator dalam mengukur pembangunan ekonomi salah satunya adalah urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga masyarakat desa yang tidak mempunyai pekerjaan dapat mencari pekerjaan di perkotaan. Dengan demikian, urbanisasi dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang ada di desa, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera.

Dewasa ini, pembangunan ekonomi senantiasa pemerintah wujudkan terhadap daerah-daerah yang cukup terpencil yang masih tertinggal dalam fasilitas infrastruktur maupun non infrastruktur. Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meminimalisir kesenjangan antar daerah yang ada. Pembangunan daerah merupakan salah satu langkah konkrit pemerintah dalam upaya pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif, termasuk penyebaran hasilnya secara merata di seluruh Indonesia, adalah koordinasi dan keterpaduan antar sektor, antara sektor dan daerah, antar daerah tingkat I, antar daerah tingkat II, serta antara daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama, dari segi pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Kedua, dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. kota dan desa saling terkait dan membentuk suatu sistem.

Oleh karena itu, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan yang terpadu dan saling mengisi. Ketiga, pembangunan daerah dilihat dari segi pemerin-tahannya. Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintahdaerah perlu berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakatnya secara adil dan merata. Oleh karena itu pembangunan daerah juga ditujukan untuk mengatasi masalah kesenjangan antar daerah, antar wilayah, antar kawasan, antar kota, antar desa, antara kota dan desa, serta antar golongan masyarakat. (Bappenas, 2014).

Secara faktual, kesenjangan antar daerah di Indonesia masih terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi geografis, serta perbedaan jumlah penduduk yang tidak merata. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa dari total 272 juta penduduk Indonesia, sebesar 56,01 persen terkonsentrasi di Pulau Jawa, dimana Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia sebanyak 47.586.943 jiwa, Sedangkan Provinsi dengan penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara (Kaltara) sebanyak 692.239 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perbedaan jumlah penduduk, maka penerimaan pemerintah daerah akan berbeda. Semakin banyak penduduk

produktif yang tinggal disuatu daerah, maka semakin besar penerimaan pendapatan daerah tersebut, salah satunya melalui pendapatan asli daerah setiap kota atau kabupaten yang ada pada suatu daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing kota atau kabupaten pada suatu provinsi, yang didapatkan melalui berbagai sumber, diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah, dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Menurut Aziz (1997) dalam Rita (2019), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten atau kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan mempermudah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di setiap daerah, karena dalam hal ini penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditujukan untuk membiayai pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah kabupaten atau kota mempunyai wewenang atas hal tersebut. Selain itu, dengan meningkatnya sarana prasarana di setiap daerah, maka akan memicu terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami

pertumbuhan selama periode 2017 sampai dengan 2021. Hal ini dapat dibuktikan melalui data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat yang tertera pada gambar 1.1.

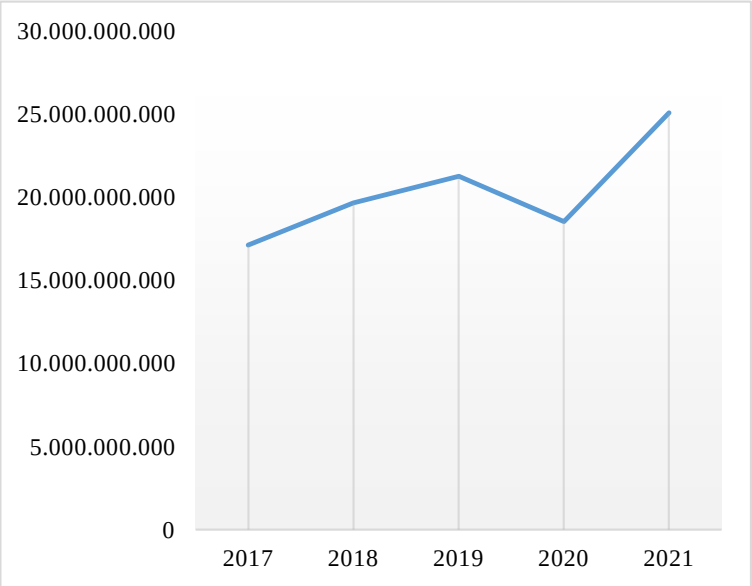

Gambar 1.1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2021

Berdasarkan data pada gambar tersebut, diketahui bahwasannya nilai pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 menjadi urutan pertama selama periode 2017 sampai 2021 yaitu sebesar Rp. 25.066.632.129, dimana terjadi perubahan sebesar 35.34% dari tahun sebelumnya yaitu 2020. Pada tahun 2017 terjadi sedikit peningkatan hanya 0,35% dari tahun 2016 menjadi Rp. 17.102.520.315,84 dan meningkat kembali sebesar 14,85% pada tahun 2018 menjadi Rp. 19.642.915.448,76 serta di tahun 2019 meningkat sebesar 8.15% menjadi Rp. 21.244.266.598.02. Selanjutnya terjadi penurunan sebesar -12.81% di tahun 2020 menjadi Rp. 18.521.882.174.00.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah tentunya berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya peningkatan Pendapatan Asli daerah, salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai tambah bruto dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah.

Menurut Halim (2001) menyatakan bahwa salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pemungutan atau upaya PAD adalah rasio antara pemungutan atau upaya PAD adalah rasio antara total PAD dan PDRB. Meningkatnya PAD melalui besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima dari PDRB yang meningkat setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya PAD yang diterima akan meningkatkan APBD di sisi PAD yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti belanja langsung ataupun pembiayaan daerah.

Terdapat dua cara dalam menyajikan nilai PDRB, diantaranya PDRB berdasarkan harga berlaku, dan PDRB berdasarkan harga konstan. Perbedaan dari kedua cara tersebut adalah ditinjau dari tujuannya, dimana PDRB atas harga berlaku (nominal) bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian disuatu daerah tersebut, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) bertujuan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Adanya pertumbuhan pada PDRB atas dasar harga konstan, menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi pula. Disisi lain, ada pula PDRB per kapita, yaitu nilai PDRB dibagi dengan banyaknya jumlah penduduk suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB per kapita suatu wilayah, maka menunjukkan adanya

kemakmuran pada penduduk wilayah tersebut.

Dalam hal ini, PDRB mempunyai kaitan erat dengan PAD, dimana pertumbuhan PDRB dapat mempengaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar PDRB yang dihasilkan, maka semakin sejahtera masyarakat di daerah tersebut. Adapun laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Barat pada gambar 1.3. berikut:

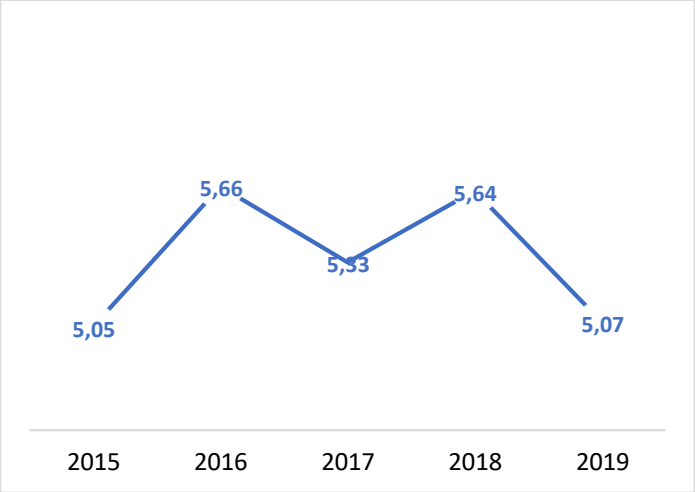

Gambar 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Barat

Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2020

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat selama periode 2015-2019 mengalami fluktuasi, dimana tercatat pada tahun 2015 merupakan tahun terendah hanya mencapai 5,05% dan tahun 2016 merupakan tahun tertinggi yang berhasil mencapai sebesar 5,66%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,33% dan naik kembali di tahun 2018 menjadi 5,64%. Tetapi, tahun 2019 tidak terjadi peningkatan bahkan mengalami penurunan menjadi 5,07%.

Indikator lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah nilai investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh. Investasi terdiri dari dua macam yaitu investasi asing atau penanaman modal asing (PMA), dan investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang paling banyak diminati investor dalam berinvestasi. Selain dari banyaknya kawasan industri, Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia sebanyak 47 juta jiwa. Menurut kepala Bank Indonesia (BI), infrastruktur menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modal di Jawa Barat, antara lain kawasan industri, jalan tol, jalur kereta api, bandara, dan pelabuhan yang terus dikembangkan, serta dukungan kebijakan dan berbagai insentif yang memberikan kemudahan bagi investor. Pada semester I 2021 realisasi investasi Jawa Barat merupakan yang tertinggi secara nasional mencapai Rp72,50 triliun bersumber dari PMA 61,06 persen dan PMDN 38,94 persen. Adapun mayoritas investasi dikucurkan untuk sektor perumahan dan kawasan industri, industri otomotif, transportasi, serta konstruksi.

Investasi merupakan hal terpenting bagi suatu industri. Pertumbuhan industri-industri yang ada di Jawa Barat tentunya tidak terlepas dari banyaknya nilai investasi yang ditanamkan, baik dari dalam negeri maupun asing. Investasi dalam negeri maupun luar negeri sangat berperan penting bagi kehidupan suatu industri yang ada si suatu daerah. Dengan demikian, investasi perlu didorong agar suatu

industri mengalami pertumbuhan.

Adapun realisasi Penerimaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 1.3.

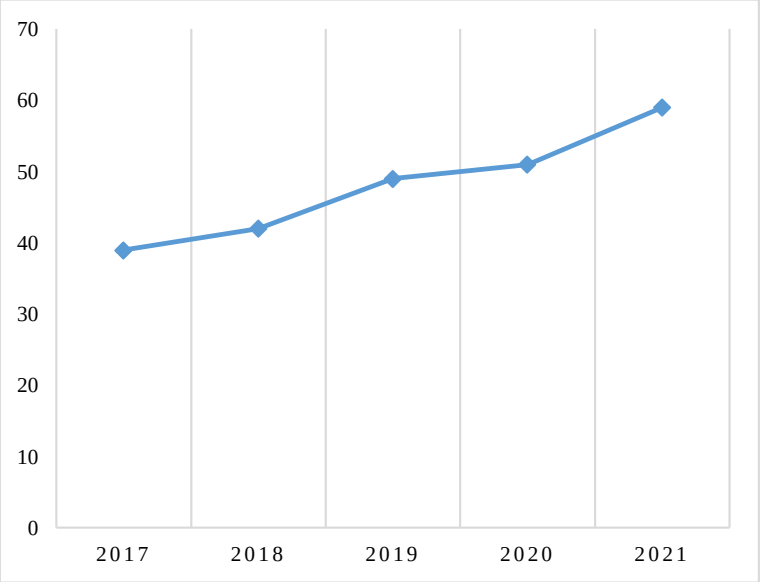

Gambar 1.3. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data pada gambar tersebut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Jawa Barat mengalami peningkatan selama tahun 2017-2021, dimana pada tahun 2021 merupakan tahun tertinggi pencapaian investasi yaitu sebesar Rp. 59 milyar. Pada tahun 2017 nilai investasi dalam negeri Jawa Barat mencapai Rp. 39 milyar, tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 42 milyar dan tahun 2019 menjadi Rp. 49 milyar serta tahun 2020 meningkat menjadi 51 milyar. Investasi dalam negeri Jawa Barat masih dalam kondisi aman karena masih terjadi peningkatan selama tahun 2017-2021, meskipun pada masa pandemi covid-19.

Berbeda halnya dengan investasi asing yang terjadi di Jawa Barat,

Bahwasannya selama periode 2017-2021 cenderung naik. Berikut adalah realisasi penerimaan Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 pada gambar 1.4.

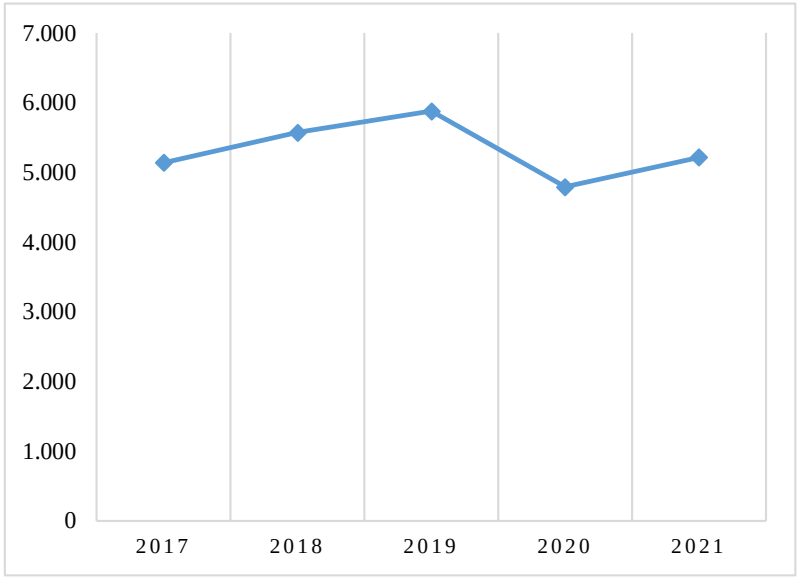

Gambar 1.4. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Juta US$)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada gambar tersebut, diketahui bahwasannya pada tahun 2017-2019 investasi asing mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021. Tahun 2017, nilai investasi asing US$ 5.142 juta. Meningkat pada tahun 2018 menjadi US$ 5.573 juta, tahun 2019 menjadi US$ 5.881 juta, dan menurun di tahun 2020 menjadi US$ 4.793 juta, serta mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi US$ 5.217 juta. Sumber penanaman modal asing cukup beragam antara lain berasal dari Korea Selatan, Jepang, China, Belanda, dan Singapura.

Investasi merupakan bagian penting dalam memberikan kontribusi terhadap

pendapatan asli daerah, karena semakin meningkatnya nilai investasi, maka lapangan pekerjaan akan semakin luas dan akan terjadi penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat kemiskinan disuatu wilayah akan berkurang.

Tingkat kemiskinan seringkali menjadi permasalahan yang lumrah, khususnya bagi negara berkembang. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu wilayah dapat memicu adanya penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi, seperti tindakan kriminalitas. Selain itu, tingkat kemiskinan akan berdampak negatif terhadap pendapatan asli daerah, karena akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semakin banyak penduduk yang menjadi pengangguran, maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menurun. Begitupun sebaliknya, Semakin banyak penduduk yang produktif bekerja, maka akan semakin tinggi Pendatapan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi padat penduduk, dimana pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk. Akan tetapi, tingginya jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang produktif bekerja, sehingga terjadinya kesenjangan antara tenaga kerja dengan penduduk bekerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang sedang bekerja, belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja tetapi tidak dan tidak sedang mencari pekerjaan, seperti pelajar dan ibu rumah tangga. Tingginya jumlah penduduk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk bekerja akan menimbulkan pengangguran.

Berikut ini adalah gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Jawa barat:

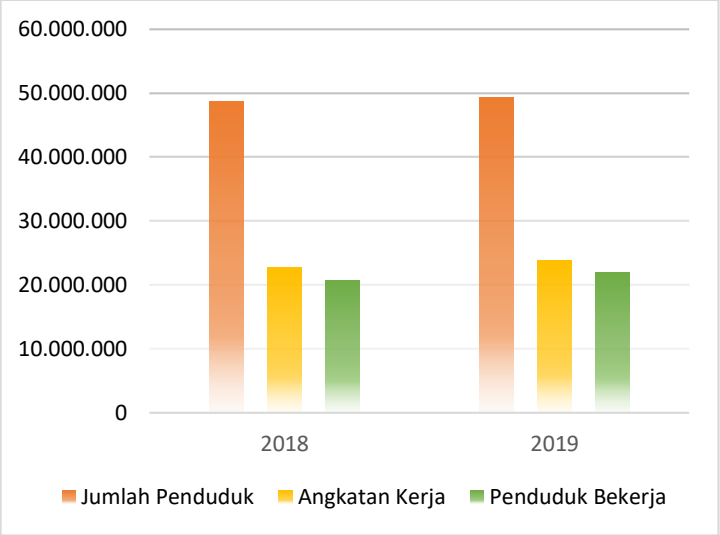

Gambar 1.5. Perkembangan Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dengan Penduduk Bekerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2019 (Jiwa)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Perkembangan jumlah penduduk, angkatan kerja dan penduduk bekerja pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada setiap tahunnya terjadi pengangguran, dimana jumlah angkatan kerja lebih besar daripada penduduk bekerja. Tahun 2018 jumlah penduduk mencapai 48.690.000 jiwa, angkatan kerja sebanyak 22.629.000 jiwa dan penduduk bekerja sebanyak 20.780.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah penduduk mencapai 49.320.000 jiwa, angkatan kerja sebanyak 23.805.000 dan penduduk bekerja sebanyak 21.903.000.

Kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk bekerja sulit untuk dihilangkan, tetapi dapat diminimalisir. Kesenjangan tersebut yang menjadi penyebab dari adanya kemiskinan yang disebabkan oleh banyaknya pengangguran. Tingginya angka pengangguran di suatu daerah, maka akan

menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tingkat kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka dapat dilihat fenomena pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti PDRB, nilai investasi dan tingkat pengangguran. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **"Analisis Determinan Pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021"**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai investasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai investasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai investasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai investasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya kegiatan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

   Memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian terkait pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai investasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

2. Bagi Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan motivasi untuk pemerintah daerah agar senanatiasa mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PDRB serta meningkatkan nilai investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, khususnya dengan meningkatkan pertumbuhan industri-industri yang ada di Jawa Barat agar bisa menyumbang pendapatan nasional. Selain itu, pemerintah diharapkan bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengancara memperluas pekerjaan, meningkatkan sarana pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat pengangguran dapat teratasi secara optimal.

3. Bagi Akademisi

Penelitian diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan pembelajaran bagi akademisi yang lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumber data dalam menunjang kegiatan perkuliahan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 9 Kota diantaranya: Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi dan Tasikmalaya serta 18 Kabupaten yang meliputi: Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang dan Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022, dimulai sejak bulan November 2021 dengan melakukan pengajuan judul kepada pihak program studi ekonomi pembangunan.

Tabel 1.1.

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022						
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Pengajuan Judul							
2	Pengumpulan Data							
3	Penyusunan UP dan Bimbingan							
4	Seminar UP							
5	Penyusunan skripsi dan bimbingan							
6	Sidang skripsidan komprehensif							